



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2021

**Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur**

Jl. Dewi Sartika No. 13 Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405

Email : bppkb@kaltimprov.go.id

Web : dkp3a.kaltimprov.go.id

SAMARINDA 75117

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 telah dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur disusun sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 merupakan tahun terakhir bagi RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, sehingga LKjIP pada tahun ini selain memuat capaian sasaran atas target-target yang telah dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja pada awal tahun anggaran 2020, juga menyajikan capaian atas tujuan daerah, sesuai dengan misi dan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu: **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**. sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP tahun 2021.

Samarinda, 24 Februari 2022

KEPALA,

Hj. NORYANI SORAYALITA, SE, MMT

Pembina Utama Muda

NIP. 19651215 198601 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja mengukur ketercapaian kinerja berdasarkan Perjanjian kinerja, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, menggambarkan adanya komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja merupakan program kegiatan yang dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU No.28 Tahun 1999) Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DKP3A Provinsi Kaltim menggambarkan tingkat kemampuan instansi dalam mencapai sasaran pembangunan sesuai visi, misi, tugas, fungsi serta tujuan yang berkorelasi dengan Tujuan, Visi Misi Pembangunan jangka menengah Provinsi Kaltim. Capaian terhadap sasaran pembangunan dilihat melalui capaian indikator kinerja, target dan realisasi serta seraoan anggaran yang dianalisa mmendalam sehingga dapat menggambarkan proses kinerja, kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan.

Capaian Kinerja pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dikatakan cukup berhasil dengan uraian sebagai berikut:

1. Kesetaraan dan keadilan gender

Sejak tahun 2010 hingga 2019, Pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Timur berada diatas angka nasional dengan menduduki rangking ke-3 besar. Capaian IPG Prov. Kalimantan Timur dalam tahun 2010-2019 cenderung meningkat.

2. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa kelembagaan perlindungan Anak yang terbentuk adalah PUSPAGA, Forum Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), FABK, PPDI dan ABK.

3. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Upaya Pengendalian penduduk dilakukan dengan memperhatikan dampak dari Bonus Demografi. Proyeksi Penduduk Kalimantan Timur tahun sampai pada 2035, menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana Program dan Kegiatan pengendalian penduduk.

4. Sistem informasi gender dan anak

Informasi Gender dan Data anak dapat diperoleh melalui Sistem Informasi On Line Perlindungan Perempuan dan Anak.

5. Fasilitasi Pelayanan administrasi kependudukan

Rangkaian Penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan data, Pembuatan data per semester serta pembuatan profil kependudukan setiap tahun.

Di sisi lain untuk menunjang program dan kegiatan DKP3A selaras dengan visi misi Provinsi Kalimantan Timur dibuat tujuan dan sasaran jangka menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

1. Meningkatkan upaya Perlindungan & Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
 - Meningkatnya layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
2. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
 - Meningkatnya penyajian data gender dan anak di tingkat Provinsi
3. Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang lebih update dan komprehensif
 - Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
4. Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga
 - Meningkatnya kualitas keluarga



5. Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur
 - Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
6. Meningkatkan layanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana

Setelah dilakukan penyesuaian sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2023 ditentukan isu strategis, indikator kinerja, capaian sasaran dan berbagai kegiatan. Untuk itu pembangunan 3 urusan yaitu urusan pelayanan administrasi kependudukan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang cukup penting dan memiliki kontribusi untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	6
BAB I	
PENDAHULUAN	7
Dasar Pembentukan Organisasi	7
Tugas dan Fungsi	11
Struktur Organisasi	12
Sumber Daya Manusia	13
Aspek Strategi Organisasi Permasalahan Utama (Isu Strategis)	30
Sarana dan Prasarana Kerja	34
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	35
Perencanaan Strategis	35
Indikator Kinerja Utama	45
Perjanjian Kinerja	48
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	51
Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya	51
Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	52
Analisis Capaian Kinerja	53
Realisasi Anggaran	83
BAB IV	
PENUTUP	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pembentukan DKP3A Provinsi mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai bentuk pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :



- a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sistem data gender dan anak;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelola aset. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;

- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis aparatur pendaftaran penduduk;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis aparatur pencatatan sipil; Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis monitoring, evaluasi dan dokumentasi kependudukan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan perempuan;

- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan anak;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tumbuh kembang anak; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sistem Data Gender dan Anak

Bidang Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang sistem data gender dan anak. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sistem Data Gender dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem data gender dan anak;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang sistem data gender dan anak;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi gender;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi anak;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi dan partisipasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kesetaraan Gender dan Anak

Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang kesetaraan gender. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem data gender dan anak;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang sistem data gender dan anak;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi gender;

- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi anak;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi dan partisipasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengendalian penduduk;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis keluarga berencana;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kualitas keluarga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

C. STRUKTUR ORGANISASI

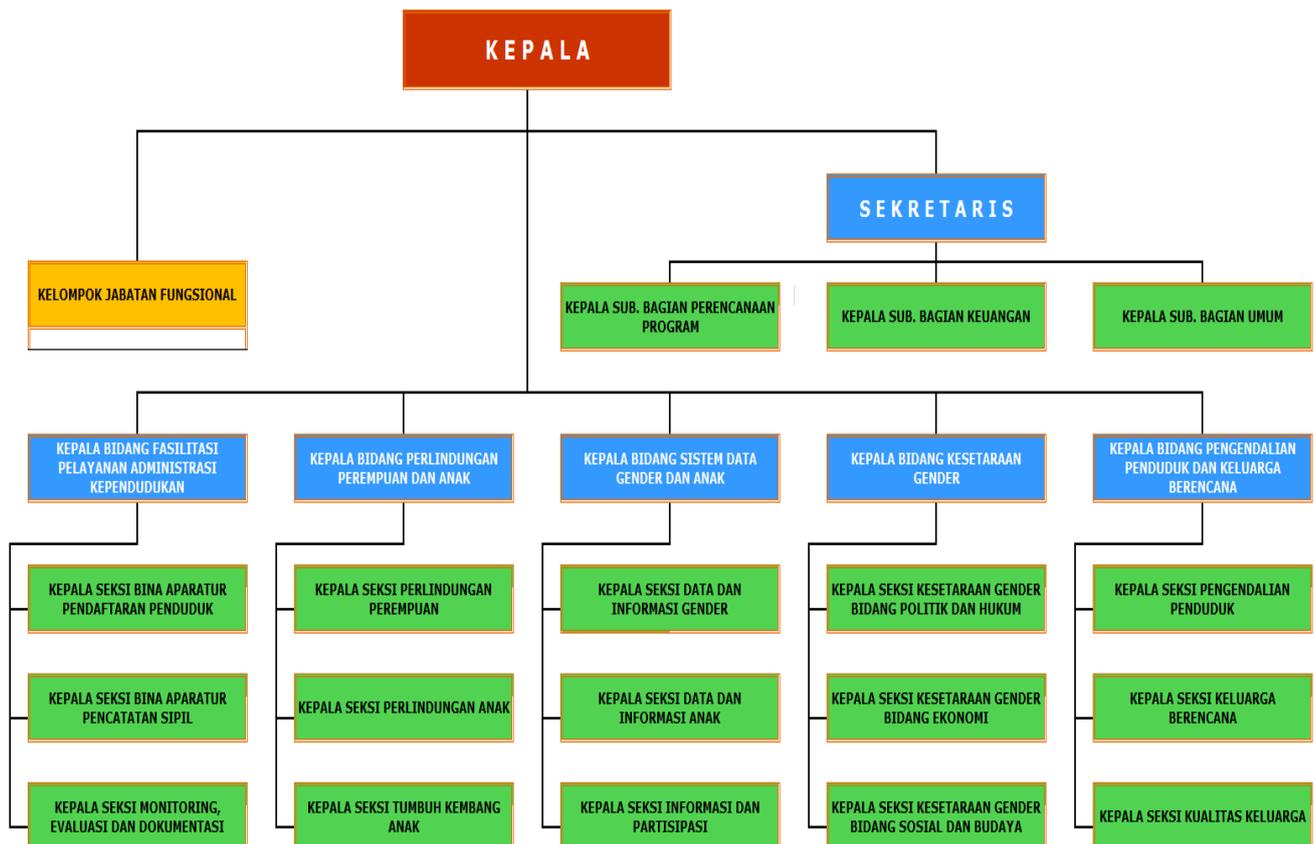
Struktur organisasi merupakan komponen-komponen penyusun pemerintahan, yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk juga pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya. Dengan adanya struktur ini, pekerjaan akan berjalan lebih optimal. Selain itu, seorang atasan pun bisa memberikan tugas kepada bawahannya secara adil serta sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seorang atasan pun juga memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, dan tidak lepas begitu saja ketika terjadi masalah.

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor 59 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur



D. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber Daya Manusia Di lingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

Pegawai di lingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 70 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 43 orang dan Non ASN 27. Pegawai ASN terdiri dari 23 orang Laki-Laki dan 20 orang Perempuan. Tingkat pendidikan pegawai merupakan sumber daya yang dimiliki organisasi, dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan golongan pegawai mempermudah penempatan berdasarkan kebutuhan, kesesuaian tugas dan peran pegawai guna pencapaian kinerja secara efektif, efisien dengan memperhatikan pengembangan kompetensi setiap pegawai.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai DKP3A Menurut Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	4	2	6	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Kasi/ Kasubbag	10	10	7	13	-	-	8	12	-	-	-	-
Fungsional Umum	4	8	1	10	1	-	-	7	1	4	-	-
Fungsional Tertentu	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
Jlh PNS	19	23	16	24	2	-	15	20	2	4	-	-
Jlh Honor/PTT	16	12	-	-	-	-	1	20	-	5	-	-
Jlh PNS + Honor/PTT	35	35	16	24	2	-	16	40	2	9	-	-

Keterangan : Data per 31 Desember 2021

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. Bidang Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan capaian kesetaraan gender dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terpilah laki-laki dan perempuan. IPM adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat per penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Untuk IPM terpilah laki-laki mampu mencapai indeks yang cukup tinggi ditingkat Nasional. Menurut data BPS – Statistik Indonesia IPM Kaltim menduduki 3 besar dari 34 Provinsi setelah DKI dan Yogyakarta dengan indeks 81,32 sementara indeks IPM Nasional sebesar 75,98. Dan DKI ada pada 83,66.

Sementara untuk IPM terpilah perempuan Kaltim menduduki peringkat ke 32 dari 34 Provinsi dengan capaian indeks 69,69 pada tahun 2020 dan 70,14 di tahun 2019. Adapun capaian indeks IPM terpilah perempuan DKI mencapai 79,17 di tahun 2020 dan mengalami kenaikan 0,01 dari capaian tahun sebelumnya. Adapun capaian IPM laki-laki dan perempuan di Kaltim terdapat kesenjangan, dapat dilihat dari capaian indeks 81,32 di tahun 2020, sementara IPM perempuan pada tahun yang sama ada pada indeks 69,69, terjadi kesenjangan indeks sebesar 11,63.

Tabel 1.2

Kondisi kesenjangan tersebut dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel kesenjangan IPM terpilah kaltim

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin			
	Perempuan		Laki-laki	
	2020	2019	2020	2019
	69.19	69.18	75.98	75.96
DKI JAKARTA	79,17	79,16	83,66	83,58
KALIMANTAN TIMUR	69,69	70,14	81,32	81,58
Paser	55,1	55,38	77,44	77,55
Kutai Barat	64,27	64,7	76,63	77,17
Kutai Kartanegara	62,36	62,63	79,04	79,14
Kutai Timur	59,79	60,36	78,4	78,89
Berau	69,46	69,74	79,28	79,31
Penajam Paser Utara	65,74	65,91	76,1	76,44
Mahakam Ulu	59,81	60,28	73,86	74,52
Kota Balikpapan	76,33	76,45	85,14	85,22
Kota Samarinda	75,29	75,48	84,34	84,42
Kota Bontang	73,77	73,84	84,92	85,15

Sumber Data : BPS Kaltim tahun 2020

Memperhatikan data diatas masih terdapat kesenjangan laki-laki dan perempuan pada proses pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga dilakukan peningkatan dan percepatan pembangunan.

Kemajuan pembangunan manusia Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami kendala. Ditandai oleh penurunan angka IPM sebesar 0,48 persen, setelah sebelumnya tumbuh positif sebesar 1,03 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, status pembangunan manusia di Kalimantan Timur berada pada level

atau kategori “Tinggi”. Status tersebut masih sama dengan status pada tahun sebelumnya.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan berbasis gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender, IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Adapun capaian IPG Kaltim dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.3
 Capaian IPG Kalimantan Timur

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2020	2019	2018
INDONESIA	91,06	91,07	90,99
DKI JAKARTA	94,63	94,71	94,7
KALIMANTAN TIMUR	85,70	85,98	85,63
Paser	71,15	71,41	70,64
Kutai Barat	83,87	83,84	83,52
Kutai Kartanegara	78,9	79,14	78,83
Kutai Timur	76,26	76,51	76,03
Berau	87,61	87,93	87,92
Penajam Paser Utara	86,39	86,22	86,34
Mahakam Ulu	80,98	80,89	80,18
Kota Balikpapan	89,65	89,71	89,76
Kota Samarinda	89,27	89,41	89,42
Kota Bontang	86,87	86,72	86,61

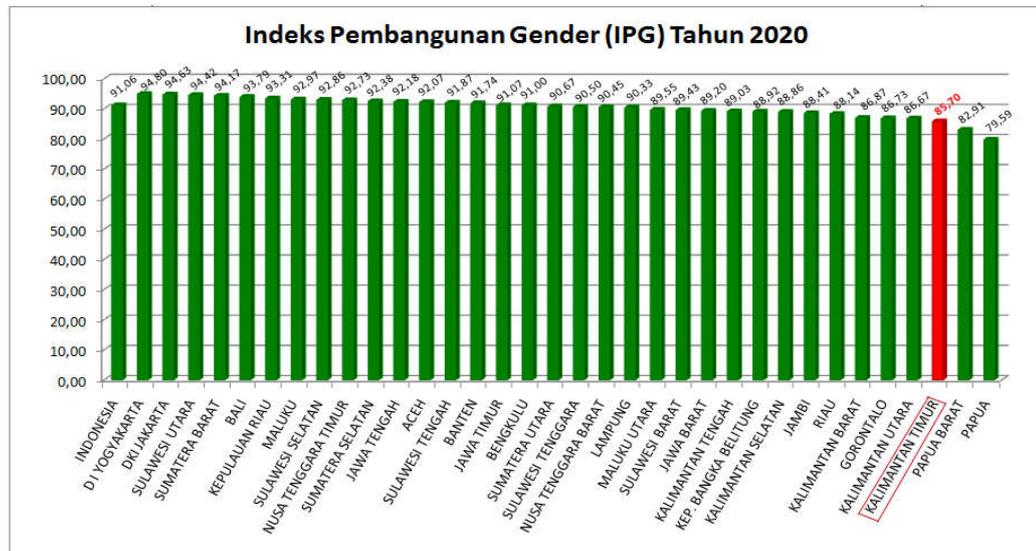
Sumber data :BPS Kaltim tahun 2020

Memperhatikan data diatas, capaian indeks Kaltim berada di bawah indeks nasional, dibandingkan dengan DKI Jakarta, Kaltim perlu melakukan percepatan pembangunan gender terkait adanya IKN. Posisi Kaltim berada pada urutan ke 32 dari 34 Provinsi se Indonesia.

Tingginya ketimpangan atau ketidaksetaraan gender tersebut menjadi tantangan untuk menyetarakan, sehingga perlu adanya dukungan dan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan responsif gender. Hal ini sesuai dengan misi pertama gubernur Kalimantan timur yaitu berdaulat dalam peningkatan SDM yang berakhlak mulia terutama perempuan pemuda dan disabilitas. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Gambar 1.2

Grafik posisi capaian IPG Kalimantan Timur secara nasional tahun 2020



Sumber data : BPS Kaltim tahun 2020

Capaian IPG berdasarkan pada beberapa komposit meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Pendapatan. Capaian komposit sumbangan pendapatan perkapita perempuan Kalimantan Timur mengalami kesenjangan yang cukup tajam dibanding Sumbangan Perkapita Laki - Laki Kalimantan Timur. Namun untuk ketiga komposit lainnya AHH, RLS dan HLS capaian angka perempuan telah dapat melampaui angka capaian Laki laki. Tertera dalam Tabel berikut:

Tabel 1.4

Perbandingan capaian komposit IPG 2020

No	Komposit	Kaltim (2020)		DKI Jakarta (2020)		Indonesia (2020)	
		L	P	L	P	L	P
1.	Angka harapan Hidup (AHH)	72.54	76.21	71,01	74.08	69.59	73.46
2.	Rata rata lama Sekolah (RLS)	10.22	9.27	11.15	10.76	8.90	8.07
3.	Harapan lama Sekolah (HLS)	13.71	13.87	13.00	12.94	12.93	13.04
4	Pengeluaran Pendapatan	17.958	6.943	22.614	16.742	15.463	9.004

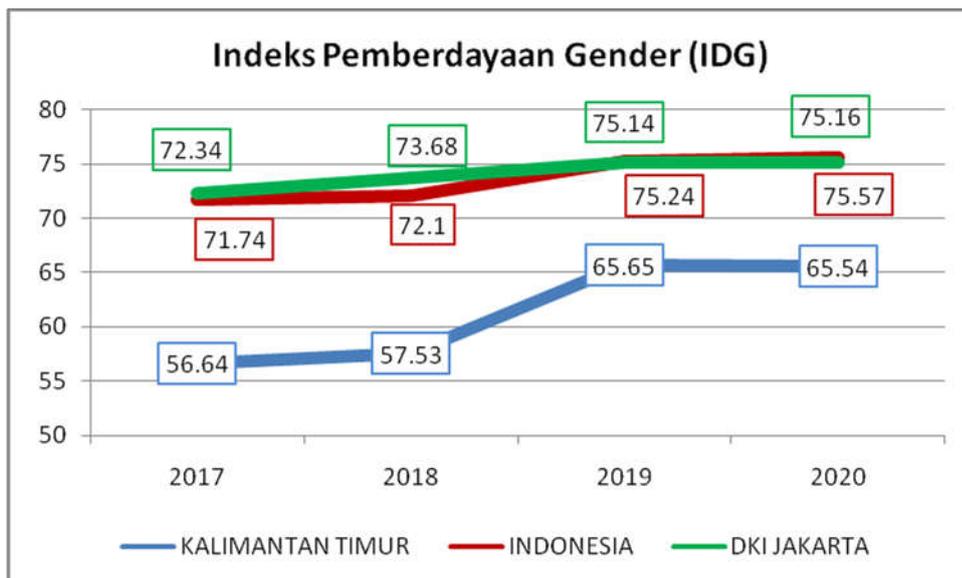
Sumber data :BPS Kaltim tahun 2020

Memperhatikan tabel diatas khususnya kondisi kesenjangan pengeluaran perkapita bisa menjadi latar belakang dan titik awal untuk menetapkan program dan kegiatan sekaligus penganggaran agar hasil dari kegiatan dapat mendorong capaian IPG Kalimantan Timur.

Selain IPG capaian indikator kesetaraan gender lainnya adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yaitu indikator yang melihat pemberdayaan perempuan pada peranan dan partisipasi di bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Posisi capaian IDG Kalimantan Timur pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan 0,11 dan pada tingkat nasional capaian IDG ini pun mengalami kenaikan 0,33 sebagai pembandingan menuju IKN, berikut disertakan data IDG DKI Jakarta, dimana mengalami kenaikan sebesar 0,02. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.3

Grafik capaian IDG Kalimantan Timur pada tingkat nasional



Sumber data : BPS Kaltim tahun 2020

Capaian IDG meliputi komposit Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, Sumbangan Pendapatan Perempuan, Keterlibatan Perempuan di Parlemen tertera dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5
 Capaian Komposit IDG Kalimantan Timur tahun 2020

No	Komposit	Kalimantan Timur	DKI Jakarta	Nasional
1.	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	45.86	46,10	48.76
2.	Sumbangan Pendapatan Perempuan	24.17	38,06	37.26
3.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	18.18	21,07	21.09

Sumber data : BPS Kaltim tahun 2020

Capaian pada komposit perempuan sebagai tenaga Profesional Kaltim masih dibawah rata-rata DKI Jakarta dan Nasional, demikian pula dengan komposit sumbangan pendapatan perempuan masih jauh dibawah capaian nasional dan DKI Jakarta, pada komposit keterlibatan perempuan di parlemen sama keadaannya dengan dua komposit lainnya, hal ini menempatkan IDG Kaltim berada pada posisi di 32 dari 34 provinsi se Indonesia.

Dalam upaya peningkatan capaian pembangunan berbasis gender digunakan strategi pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memenuhi beberapa persyaratan diantaranya (1) kelembagaan (2) komitmen (3) kebijakan (4) Data pilah (5) Metode (6) partisipasi masyarakat (7) SDM dan anggaran. Komitmen Pemerintah Daerah dalam implementasi PUG melalui penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah berbasis ARG}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kaltim}} \times 100 \%$$

Sedangkan Pelayanan Kinerja pada urusan perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang tertuang dalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu persentase pelaku ekonomi perempuan dengan rumusan :

$$\frac{\text{Pelaku Ekonomi Perempuan}}{\text{Jumlah Pelaku Ekonomi}} \times 100 \%$$

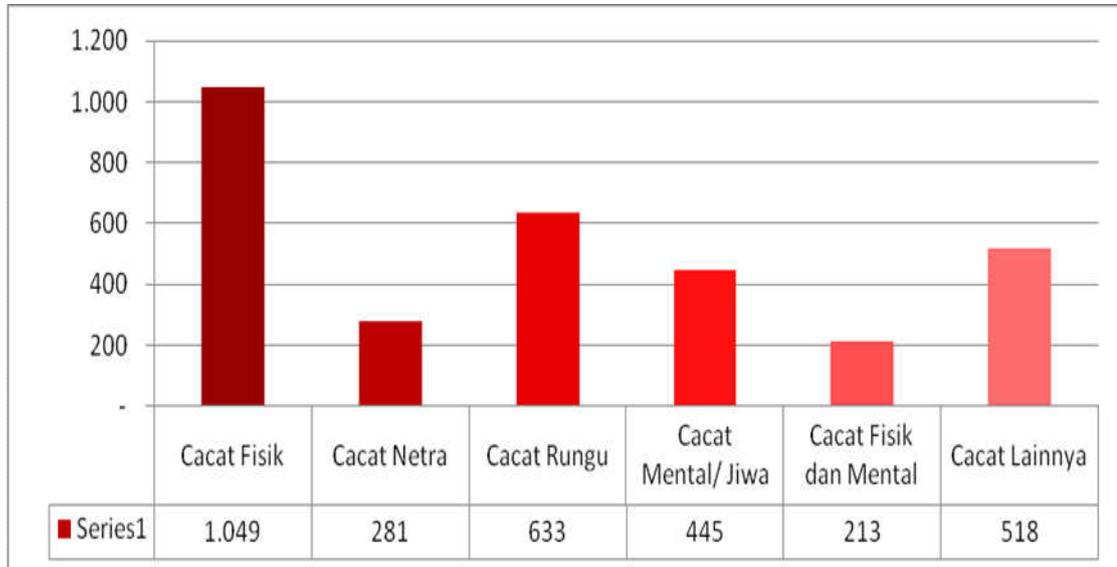
2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Salah satu bentuk ketidaksetaraan Gender adalah Tindak Kekerasan, perdagangan orang, korban pornografi, dll.

Bentuk tindak kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga, ekonomi. Untuk melakukan pencegahan, pelayanan penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sebagai bentuk pemenuhan hak korban bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi masyarakat. Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota.

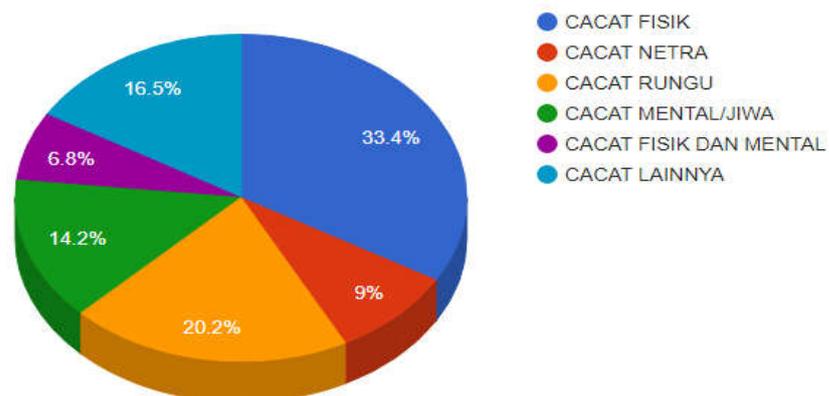
Berdasarkan data simfoni tahun 2021 terdapat jumlah kekerasan pada Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif selain Pemerintah juga meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan mas media. Beberapa kelembagaan perlindungan anak adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum Anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota, jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak anak serta melakukan percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup tinggi. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1.6
Jumlah penduduk disabilitas/Penyandang Cacat Provinsi Kalimantan timur
Semester I Tahun 2021



Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim

Gambar 1.4
Grafik Jumlah penduduk disabilitas/Penyandang Cacat Provinsi Kalimantan timur
Semester I Tahun 2021



Disabilitas/Kecacatan merupakan bagian dari keberagaman. Disabilitas disebabkan oleh lingkungan, bukan kekurangan fisik seseorang. Lingkunganlah yang harus berubah agar kaum disabilitas, khususnya anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

anak-anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual dari lingkungannya. Mereka juga rentan mendapat stigma atas kondisi kedisabilitasannya. Rentan menjadi korban pemasungan, rentan mendapat *bullying*, dan rentan menjadi korban kekerasan fisik atau eksploitasi.

Persoalan yang dihadapi anak penyandang disabilitas bukan hanya soal aksesibilitas, akomodasi layak, tapi tentang pemenuhan hak anak lainnya seperti perlakuan yang salah, penelantaran, korban stigmatisasi dari pelabelan.

Pelayanan Kinerja pada urusan perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang tertuang dalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Rasio KDRT dengan rumusan :

$$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

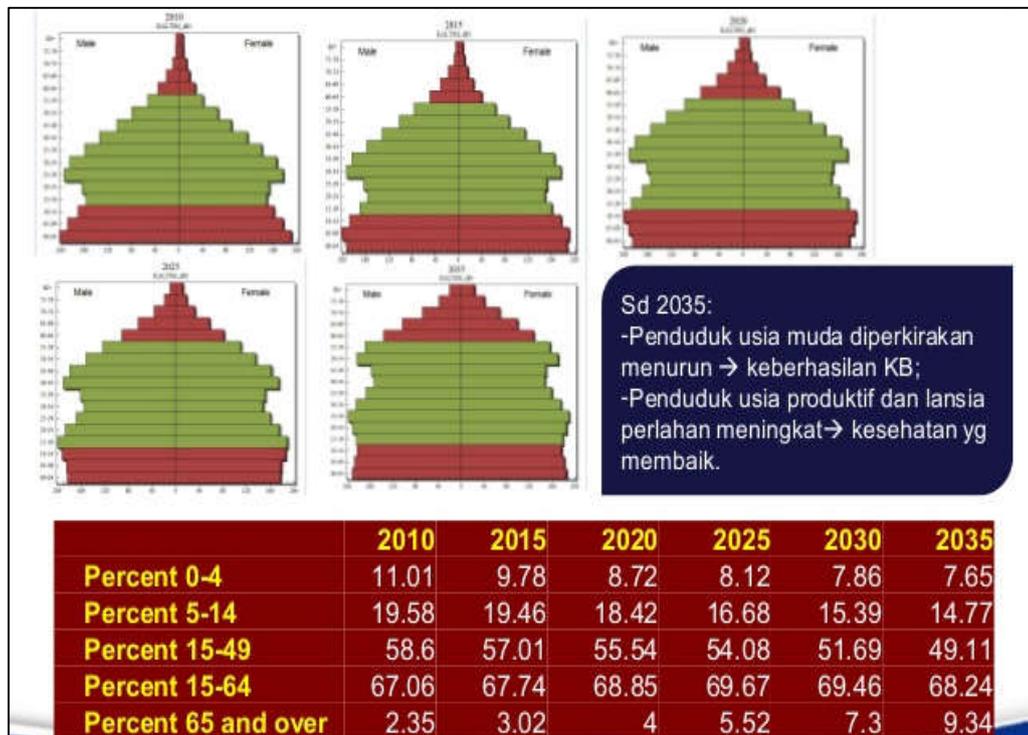
3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk merupakan usaha mempengaruhi pertumbuhan penduduk kearah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Usaha ini dilakukan melalui suatu kebijaksanaan Pemerintah di bidang kependudukan. Pengendalian kependudukan dilakukan melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana, yang ditujukan untuk mencapai suatu tingkat kelahiran tertentu di masa yang akan datang.

Masalah kependudukan adalah masalah Pemerintahan baik menyangkut aspek pemerintahan, administrasi, sosial, ekonomi, budaya, maupun kesejahteraanya. Penduduk atau rakyat adalah aset utama dari suatu negara yang perlu dilindungi oleh pemerintah, masalah penduduk akan berdampak pada lahirnya masalah sosial, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban serta pertahanan negara. Kondisi Proyeksi Penduduk Kaltim dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar 1.5

Grafik Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 - 2035

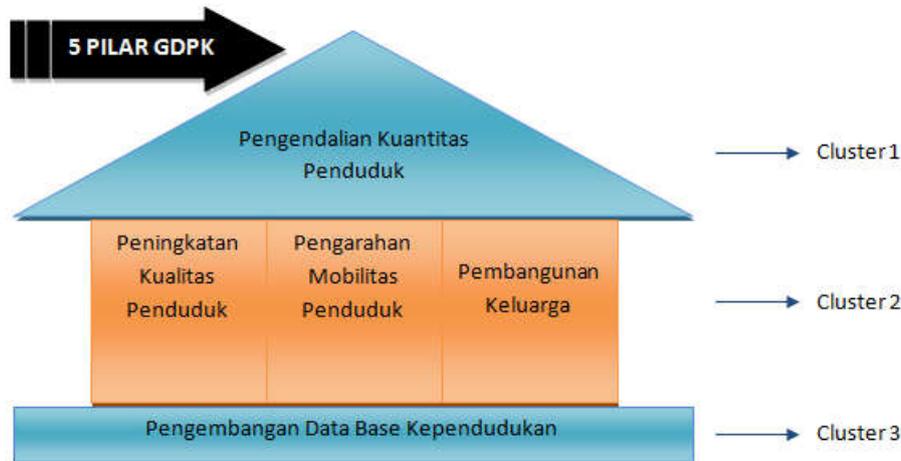


Sumber data : BPS RI

Grafik tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk angkatan kerja lebih banyak dari pada penduduk anak dan lansia. Sehingga penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dll memerlukan kebijakan yang strategis dan menjadi kebutuhan utama.

Jumlah sebaran penduduk yang kurang merata dengan masih terpusat pada kawasan pemerintahan, berdampak pada kualitas hidup, kerusakan hutan dan lahan, sumber daya air, pendangkalan sungai, pencemaran lingkungan dan lain-lain. Sebaran penduduk yang kurang merata juga akan berdampak pada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pemerataan pembangunan. Untuk itu diperlukan proses perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Penyusunan GDPK dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat diperlukan. Berikut GDPK Kaltim tahun 2021 sebagai panduan dalam kerangka berpikir guna mencapai pembangunan kependudukan.

Gambar 1.6
Pilar GDPK Kaltim



Sumber data : DKP3A Kaltim

Penyusunan GDPK mencakup 8 hal yaitu, mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja. Mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, dan mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Hingga 2045, diproyeksikan pertumbuhan penduduk Kaltim setiap lima tahun meningkat rata-rata 4,41%. Pada 2020, jumlah penduduk Kalimantan Timur diprediksi mencapai 3,6 juta jiwa dengan 1,9 juta laki-laki dan 1,7 juta perempuan. Lima tahun kemudian meningkat 5,86% menjadi 3,9 juta jiwa dengan 1,9 juta laki-laki dan 1,8 perempuan. Pada 2030, jumlah penduduknya meningkat 5,02% menjadi 4

juta jiwa. Hingga 2045 penduduk Kalimantan Timur diproyeksikan meningkat 5,8% dari lima tahun sebelumnya. Secara rinci, penduduk laki-laki dan perempuan hanya selisih 3,8 ribu jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 2,25 juta dan perempuan sebanyak 2,24 juta. Sementara laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 sebanyak 1,93 di atas rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional 1,25% per tahun. Hal tersebut memerlukan antisipasi dini berupa implementasi GDPK dan pelaksanaan teknis dalam Program KB secara terintegrasi. Pelayanan Kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menggunakan indikator laju pertumbuhan penduduk dalam mencapai pembangunan kependudukan.

4. Sistem Informasi Gender dan Anak

Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak. Sistem data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Data anak adalah data kondisi anak perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 tahun yang terpilah menurut kategori umur.

Untuk terwujudnya persamaan pandangan tentang data gender dan anak, serta memudahkan berkomunikasi diperlukan mekanisme sistem data gender dan anak, antara lain :

- a. Indikator dan jenis data yang dibutuhkan,
- b. Pengumpulan data,
- c. Metode pengumpulan dan alur data,
- d. Periode pengumpulan data,
- e. Penerima Manfaat.

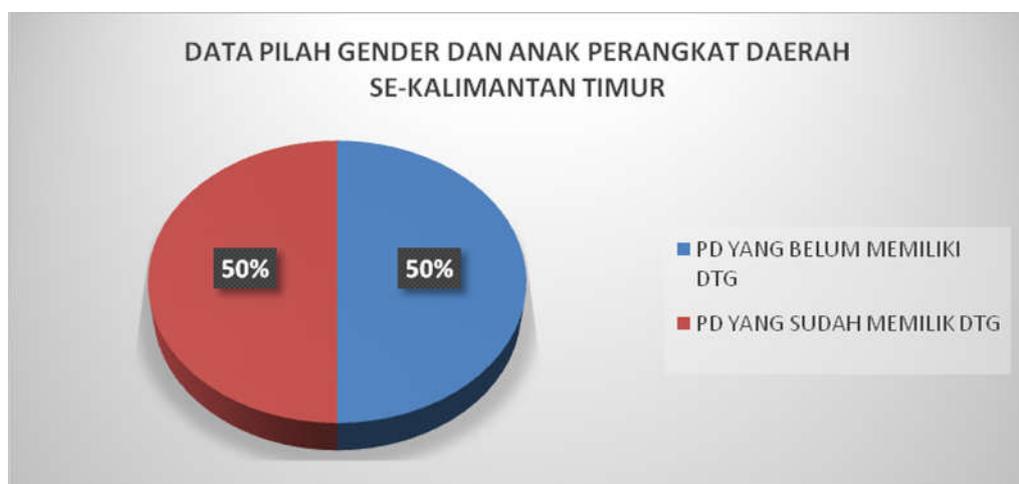
Data Terpilah Gender (DTG) merupakan salah satu prasyarat terwujudnya pengarusutamaan gender (PUG) dan merupakan bagian penting dari proses Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). DTG merupakan indikasi awal ada atau tidaknya sebuah kesenjangan. Hal ini bisa menjadi basis kajian lebih dalam terkait kesenjangan yang ada. DKP3A sebagai fasilitator DTG dan Diskominfo Provinsi Kaltim sebagai wali data mempunyai kewenangan untuk mengidentifikasi DTG Perangkat Daerah yang diperlukan guna penyusunan kebijakan Program Kegiatan yang responsif gender.

Data Terpilah Anak merupakan Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) kluster kebutuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan, antara lain: data anak yang memiliki akte kelahiran, informasi layak anak, lembaga partisipasi anak;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain: data tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain: data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses air bersih.
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, antara lain: data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah anak; dan
- e. perlindungan khusus, antara lain: data anak berkebutuhan khusus (disabilitas, autis, istimewa), data kekerasan terhadap anak, data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), data anak jalanan, dan data anak yang terisolasi

Dari 34 perangkat daerah yang merupakan kelompok Kerja (POKJA) Data Terpilah yaitu wadah komunikasi di Provinsi Kaltim untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender, terdapat 50% Perangkat Daerah yang sudah memiliki DTG, tertera dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 1.7
Grafik Data Pilah Gender Perangkat Daerah



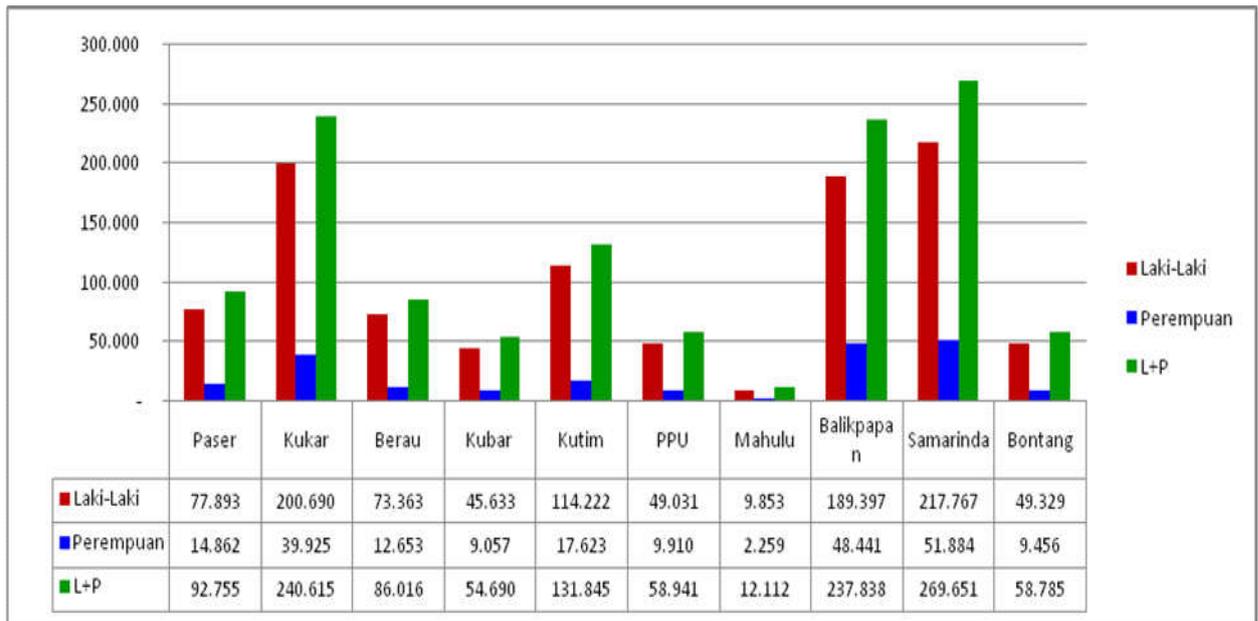
Sumber data : DKP3A Kaltim

Berikut tabel data jumlah penduduk perempuan kepala keluarga, salah satu kelompok data gender yang digunakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan terkait pelaku usaha ekonomi perempuan dan program kegiatan lainnya.

Tabel 1.7

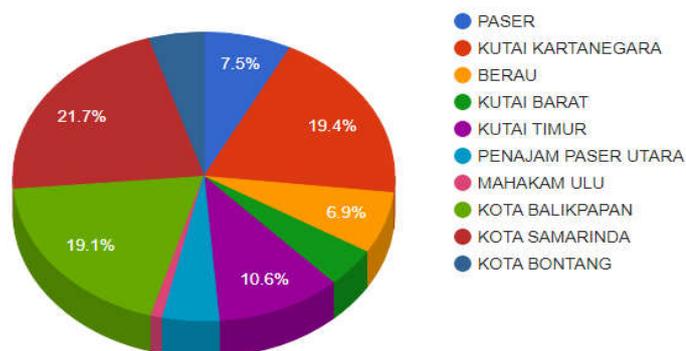
Data Jumlah Penduduk Kab/Kota

Berdasarkan Jenis kelamin Perempuan Berstatus Kepala Keluarga



Gambar 1.8

Grafik Jumlah Kepala Keluarga menurut jenis kelamin di Kabupaten/Kota



Sumber data : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester I Tahun 2021

Untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja pelayanan pemanfaatan data gender dan anak maka digunakan formula perhitungan capaian program SIGA sebagai berikut :

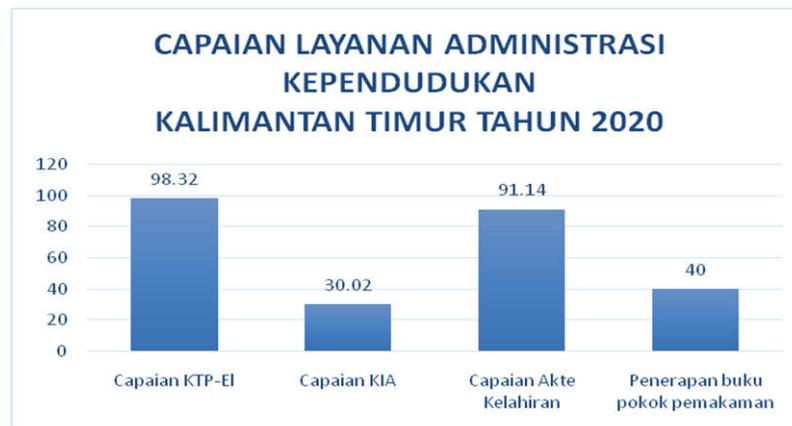
$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data gender} \times 100\%}{\text{Jumlah perangkat daerah}}$$

5. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adapun jenis administrasi pelayanan kependudukan meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil. Berikut capaian layanan kinerja administrasi kependudukan sebagai bahan penyusunan kebijakan program kegiatan terkait pemenuhan hak sipil penduduk Kaltim.

Gambar 1.9

Grafik capaian layanan administrasi kependudukan



Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berguna sebagai bahan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Demikian pentingnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan maka telah dilakukan berbagai Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk dapat menggunakan hak

akses dalam memanfaatkan data kependudukan. Berikut keadaan PKS dan akses Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Tabel 1.8

Tabel Perjanjian Kerjasama dan Akses di Provinsi dan Kabupaten/Kota

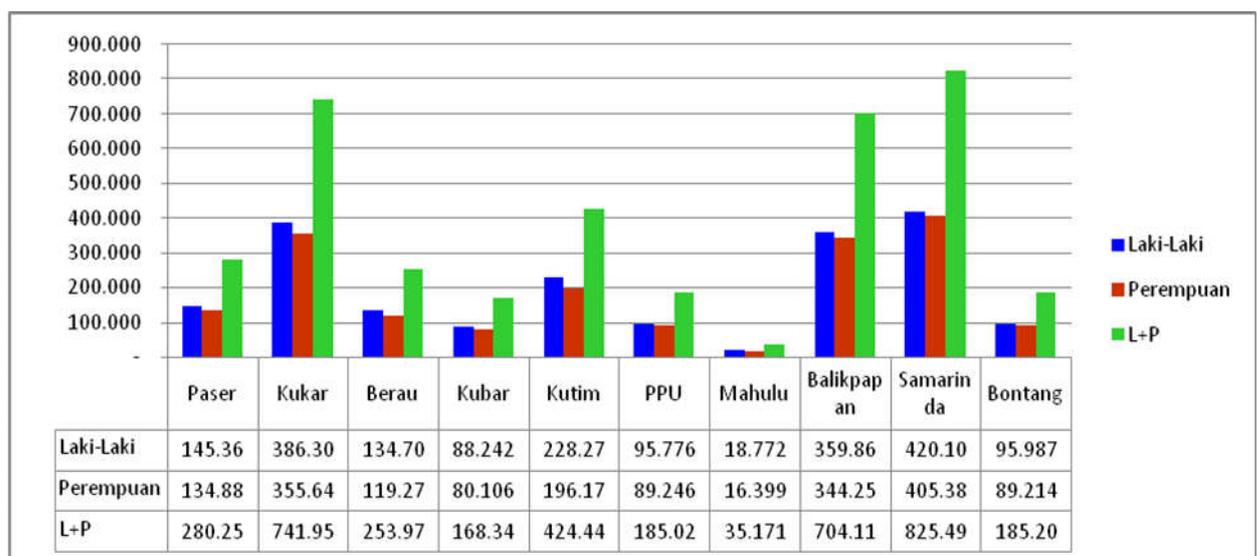
No	Kabupaten/Kota	PKS s/d 31 Des 2020	Akses DWH s/d 31 Des 2020	PKS s/d 31 Jan 2021	Akses DWH s/d 31 Jan 2021
1	Provinsi	7	4	7	4
2	Kutai Kartanegara	28	4	28	4
3	Balikpapan	10	9	10	9
4	Kutai Timur	14	1	14	1
5	Samarinda	12	8	12	8
6	Berau	5	0	5	0
7	Paser	20	1	20	1
8	Bontang	9	9	9	9
9	Kutai Barat	9	1	9	1
10	Mahakam Ulu	0	0	0	0
11	PPU	5	1	5	1

Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim

Salah satu kelompok data yang memenuhi hak akses yang digunakan oleh berbagai sektor adalah keadaan jumlah penduduk Kaltim seperti tertera dalam table berikut:

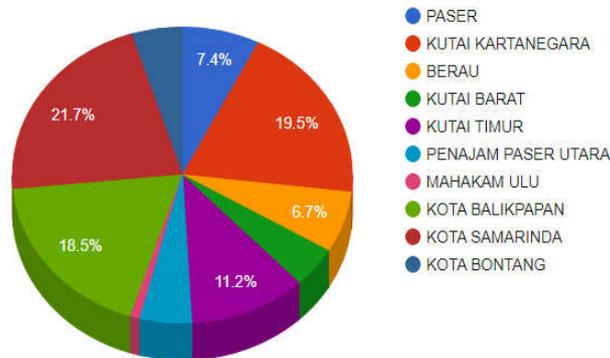
Tabel 1.9

Data Jumlah Penduduk Kab/Kota Se Kalimantan Timur Semester 1 tahun 2021



Sumber data : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri SMS I Tahun202

Gambar 1.10
Grafik Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2021 Semester I



Untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja layanan administrasi kependudukan maka digunakan formula perhitungan capaian Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data gender} \times 100\%}{\text{Jumlah perangkat daerah}}$$

6. Pelayanan Kesekretariatan

Pelayanan administrasi perkantoran merupakan program dan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan publik dengan baik. Adapun Program dan kegiatan meliputi :

- a. Program Pelayanan Adminiatriasi Perkantoran dengan indikator Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan DKP3A. Diharapkan 2023 mencapai kepuasan 90%. Adapun kegiatan meliputi ;
- b. Pelaksanaan Adminisrasi Perkantoran dengan indikator kondisi gedung kantor beserta operasional dapat berjalan optimal.
- c. Program peningkatan sarana dan parasarana Aparatur dengan indikator sampai pada tahun 2023 enam unit perangkat daerah memiliki kinerja pelayanan tepat waktu. Adapun kegiatan meliputi Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan prasarana mendukung unit kerja dapat mendukung operasional dengan tepat waktu.
- d. Program Penusunan Dokumen Perencana, pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah dengan indikator Akuntabilitas Kinerja DKP3A, Adapun kegiatan meliputi :

- Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan indikator laporan kinerja tepat waktu.
 - Rakor Bidang Pemberdayaab Perempuan dan perlindungan anak dengan indikator adanya rekomendasi PPPA
 - Forum RKP Bidang PPPA, Pengendalian penduduk dan KB serta Pelayanan Administrasi kependudukan.
- e. Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan pemerintah daerah dengan kegiatan meliputi:
- Koordinasi dan konsultasi Kelembagaan pemerintah Daerah
 - Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a) Permasalahan terkait kesekretariatan:

- Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Hasil Evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman.
- Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- Kurangnya pengembangan kompetensi ASN disebabkan oleh terbatasnya diklat yang tersedia, diklat yang ada hanya pada kegiatan teknis tertentu.
- Adanya Mutasi Pegawai pada bidang teknis menghambat proses pelayanan.
- Belum optimalnya penggunaan SOP dalam pelayanan internal sehingga berpengaruh terhadap layanan publik.
- Dalam capaian kinerja belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

b) Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki.
- Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.

- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan.
 - Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya diserahkan kepada suami/anak laki-lakinya.
 - Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.
- c) Permasalahan Perlindungan Hak Perempuan:
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - ✓ Perhitungan Data Korban Kekerasan sering terjadi tidak optimal karena terdapat kasus yang tidak dilaporkan, masyarakat masih enggan melaporkan karena menanggung aib keluarga, atau karena tidak mengetahui lembaga layanan.
 - ✓ Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas
 - ✓ Belum tersedianya data perempuan tenaga kerja korban kekerasan
 - ✓ Belum optimalnya pencatatan laporan data kekerasan melalui aplikasi simfoni dikarenakan mutasi pegawai/ tenaga teknis.
 - Perempuan sangat rentan terhadap pornografi dan kekerasan.
 - Belum maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas PTPPO serta belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dll.
 - Belum optimalnya peran lembaga pemerhati perempuan dalam pemenuhan perlindungan hak perempuan.
- d) Permasalahan Perlindungan Anak:

- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
 - Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak.
 - Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
 - Angka anak Putus sekolah yang cukup tinggi.
 - Belum sepenuhnya sistem perlindungan di provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan baik.
- e) Permasalahan Tumbuh Kembang Anak:
- Belum semua anak memiliki akte kelahiran.
 - Masih tingginya anak yang belum memiliki kartu identitas anak.
 - Kurangnya pengetahuan / informasi tentang pengasuhan dan pembinaan keluarga yang aman. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anak korban kekerasan.
 - Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
 - Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
 - Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak.
- f) Permasalahan Sistem Informasi Gender dan Anak.
- Data dan informasi yang ada tidak terpilah dan tidak terbaru
 - Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan anak
 - Masih kurangnya partisipasi OPD dalam menyediakan data gender dan

anak.

- Kurangnya tersedianya kelembagaan sistem informasi gender dan anak
- Belum semua wilayah Kalimantan Timur dengan mudah mengakses internet untuk penggunaan aplikasi Simfoni PPPA.

g) Permasalahan Pengendalian Penduduk dan KB

- Banyaknya penduduk yang migrasi ke Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan taraf hidup terbatas oleh kompetensi rawan menjadi kelompok marjinal.
- Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesempatan kerja terutama bagi perempuan.
- Kurangnya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga
- Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB
- Tingginya angka perceraian di karenakan pendewasaan usia pernikahan pertama belum optimal.

h) Permasalahan terkait Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

- Kurang optimalnya fungsi organisasi / lembaga penyedia data dalam penyediaan data terpilah atau data gender.
- Belum tersedianya jaringan yang memadai untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan.
- Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/profil kependudukan oleh stakeholder terkait

G. SARANA DAN PRASARANA

Sarana prasarana dan kondisinya yang dimiliki DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.10
 Sarana dan Prasarana Di lingkungan DKP3A Tahun 2021

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	4.213,67	m2
2	Gedung	3	Unit
	Gedung 1	1.440	m2
	Gedung 2	350	m2
	Gedung 3	48	m2
	Mushola	36	m2
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	2	Jaringan
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	1	Ruang
8	Ruang Arsip	-	Ruang
9	Aula	1	Ruang
10	Koperasi	-	-
11	Taman Dalam	-	-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis DKP3A Provinsi Kaltim

Perencanaan Strategis DKP3A mengalami perubahan dari Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2018 menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 – 2023 sesuai dengan pemerintahan atau Gubernur Kalimantan Timur terpilih tahun 2019 - 2023. Adapun perencanaan kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 5 Tahun

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak		Rasio KDRT	%	18.16	27.2	0.048	0.042	0.038
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	72.00	74.00	78.00	89.00	90.00
2	Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur		Persentase pelaku ekonomi perempuan Kaltim	%	37	62	50	60	70
		Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	55	60	65	85	100
3	Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang lebih update dan komprehensif		Peningkatan dokumen administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	%	97	98	99	100	100



NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	97	98	99	100	100
4	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga		Meningkatnya jumlah kampung KB	Kampung KB	160	175	299	315	330
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	3.66	3.67	2.54	2.52	2.50
5	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas		Peningkatan pemanfaatan data gender dan anak	%	30	35	40	45	50
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	30	35	40	45	50
6	Meningkatkan layanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana		Persentase pencapaian kinerja DKP3A	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana	persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	100	100	100	100	100

Tabel 2.2
 Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator	Target
Meningkatkan layanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana	Persentase pencapaian kinerja DKP3A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	90%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP	66%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA -SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen forum perangkat daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	1 tahun
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan pegawai	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas pegawai	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimtek				



Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Indikator	Target
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	1 tahun
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen rapat koordinasi daerah SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap kenyamanan di tempat kerja	60%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang tersedia	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12 bulan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berfungsi baik dan layak beroperasi	11 unit



Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Indikator	Target
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan yang tersedia	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	1 tahun
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga PUG	3 lembaga PUG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen pelaksanaan PUG	1 Dokumen
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Pendampingan dan advokasi PUG	25 Peserta
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Sosialisasi pelaksanaan kebijakan PUG	120 Peserta
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum	1 dokumen
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta kebijakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	60 Peserta
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta pendampingan dan advokasi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	30 Peserta



Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Indikator	Target
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan	1 dokumen
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta advokasi dan pendampingan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan	50 Peserta
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta peningkatan kapasitas lembaga layanan Pemberdayaan Perempuan	100 Peserta
			Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta yang mendapatkan KIE Pemberdayaan Perempuan	150 peserta
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kebijakan Perlindungan Perempuan	4 Kebijakan
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan	30 orang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta/lembaga layanan yang mengikuti pelatihan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	30 orang
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0.054%
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0.054%



Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Indikator	Target
			Kabupaten/Kota		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan	30 Orang
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta lembaga penyedia layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	30 Orang
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan Pemenuhan Hak Anak	3 Kebijakan
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Penguatan pelembagaan PHA	1 Kab/Kota
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak	1 Kab/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	200 Orang
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pengembangan KIE pemenuhan hak anak	100 peserta
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100 peserta



Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Indikator	Target
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	0.06%
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak	2 Dokumen
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (Peserta 5 layanan terpadu)	2 Dokumen
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak	350 Peserta
			Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti KIE yang Memerlukan Perlindungan	350 Peserta
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	capaian data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah	65%
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan	65%
			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah data gender Prov/Kab Kota	20 Data
				Jumlah data terpilah anak Pro/Kab/Kota	20 Data
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah pemanfaatan data gender dan anak yang disajikan	20 Data
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	6 Kebijakan
			Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk kab/kota se-Kaltim	6 Dokumen
			Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk yang telah ditetapkan	6 Dokumen



Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Indikator	Target
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kebijakan terkait pencatatan sipil	6 Kebijakan
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kebijakan terkait pelayanan catatan sipil kab/kota se-Kaltim	6 Dokumen
			Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah kebijakan teknis di bidang catatan sipil yang telah ditetapkan	6 Dokumen
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kebijakan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	5 Kebijakan
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah data kependudukan	3 Data Kependudukan
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah SKPD Prov. Kaltim yang melakukan pemanfaatan data (DAK)	7 SKPD
			Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan pribadi yang telah tersusun	3 Data Kependudukan
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	1 Kebijakan
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen grand desain pembangunan kab/kota dalam 5 aspek/	1 Dokumen
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 Dokumen
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan yang terbina	



Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Indikator	Target
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	33%
			Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peningkatan jumlah peserta KB	200 Peserta
			Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah peserta advokasi /sosialisasi penurunan angka stunting	80 Peserta
			Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta yang mengikuti konseling kespro	60 Peserta
			Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah calon pengantin yang telah dibina untuk mendapatkan pemahaman konseling	60 Peserta
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Peningkatan SDM ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Kebijakan
			Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	140 Peserta
			Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	140 Peserta

B. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3
 Indikator Kinerja Utama (IKU) DKP3A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	Kekerasan perempuan dan anak Kaltim cenderung meningkat, maka diperlukan strategi dalam pencegahan pelayanan agar angka kekerasan dapat berkurang. Berdasarkan Sistem Informasi On Line perlindungan perempuan dan anak se Kaltim, pada tiga tahun terakhir mengalami turun naik dari 406, 722 dan 287. Walaupun di tahun 2018 menggambarkan adanya penurunan kasus, namun hal tersebut masih menggambarkan adanya pelanggaran hak atas perempuan dan anak, dan perlu mendapatkan layanan terpadu bagi korban kekerasan	Simfoni PPPA, Administrasi Kependudukan (DKP3A Kaltim), BPS Kaltim	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$
2	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	Pengarusutamaan Gender (PUG) diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas kesetaraan dan keadilan gender, yang diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kalimantan Timur. Pencapaian pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur yang diukur melalui Indeks	DKP3A	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah berbasis ARG}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kaltim}} \times 100$



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi Perhitungan
				Pembangunan Manusia (IPM) mampu mencapai indeks yang cukup tinggi ditingkat Nasional. Sejak tahun 2010 hingga 2019, IPM Provinsi Kalimantan Timur berada di atas angka nasional dengan menduduki ranking ke-3 besar, namun untuk pencapaian pembangunan manusia berbasis pemberdayaan dan pembangunan gender belum sebaik capaian IPM, menurut data KPPA 2018 ranking IPG Kalimantan Timur di tingkat nasional pada tahun 2018 berada di peringkat ke-31 dari 34 Provinsi		
3	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	Data base kependudukan menggambarkan layanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan untuk masyarakat meliputi kepemilikan Kartu Keluarga, akte, E-KTP, Kartu Identitas Anak, dll. Ketersediaan administrasi kependudukan sangat diperlukan oleh masyarakat guna mendapatkan kemudahan berbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dll yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga	Administrasi Kependudukan Kabupaten Kota, Direktorat Jendral Kependudukan & Catatan Sipil Kemendagri	$\frac{\text{Penduduk yang mendapatkan layanan}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi Perhitungan
4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	Adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara jumlah desa di Kaltim dengan jumlah PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) yang memiliki wawasan/pemahaman tentang keluarga secara kholistik dan Responsif gender yang tersedia di Kab/Kota sebagai ujung tombak pengendalian penduduk di daerah	BKKBN, DKP3A	$Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)$ <p>Pt = Jumlah Penduduk Pada Tahun Ket Po = Jumlah Penduduk Pada Tahun Dasar B (birth) = Jumlah Kelahiran Selama Periode 0-t D (death) = Jumlah Kematian Selama Periode 0-t Mo = Jumlah Migrasi Keluar Selama Periode 0-t Mi = Jumlah Migrasi Masuk Selama Periode 0-t</p>
5	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	Data gender atau data pilah merupakan informasi utama dan pertama yang diperlukan untuk mempertimbangkan waktu, objek, sasaran secara tepat, sehingga program dan kegiatan dapat dicapai optimal. Dengan data gender Hasil, Partisipasi, Manfaat, dan fungsi kontrol pembangunan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Penggunaan data gender dalam pembangunan merupakan mandat RPJMNAS, RPJMD yang harus dipedomani dalam pelaksanaan program kegiatan DKP3A dan seluruh Perangkat Daerah.	Administrasi kependudukan (DKP3A kaltim), BPS Kaltim, KPPA-RI	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data gender}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$

C. PERJANJIAN KINERJA 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut adalah lembar Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dengan Gubernur Kalimantan Timur (PK yang telah disahkan terlampir):

Tabel 2.4
Indikator Perjanjian Kinerja (PK) DKP3A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	78
3	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	65
4	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	100
5	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,54
6	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	40

1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Pada Tahun Anggaran 2021 DKP3A mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 32.580.509.000,-, terdiri dari Belanja Gaji Rp. 9.344.839.000,- Belanja Operasional Rp. 13.362.425.000,- Belanja DAK (Admindak) Rp. 1.326.175.000,-, Belanja DAK (PPPA) Rp. 397.070.000,- Belanja DID Rp. 8.150.000.000,- Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran posisi 31 Desember 2021 adalah Realisasi Belanja Gaji Rp. 7.893.688.511, Realisasi Belanja Operasional, DAK (Admindak & PPPA), DID sebesar Rp. 23.235.670.000. Secara rinci tertuang dalam table berikut :

2. Target Belanja DKP3A Provinsi Kaltim

Tabel 2.5
Target Belanja DKP3A Tahun 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja operasi	Rp. 32.580.509.000,-	Rp. 21.679.414.822,-	66,54 %

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja operasi Tahun 2021 DKP3A Provinsi Kaltim yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
 Anggaran Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Rp. 9.798.094.625,-	Rp. 2.776.847.036,-	28,34
2	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	Rp. 999.325.201,-	Rp. 748.506.351,-	79,90
3	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Rp. 6.326.175.000-	Rp. 5.158.704.293,-	81,55
4	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Rp.460.000.000,-	Rp. 416.539.783,-	90,55
5	Meningkatnya penyajian data gender dan anak di tingkat Provinsi	Rp. 500,000,000,-	Rp. 477,025,547,-	95.41
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana	Rp. 14,496,914,174,-	Rp. 12,101,791,812,-	83.21

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya pada Sub Bab ini disajikan :

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.1
 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	Perencanaan Kinerja	30%	22,93	24,09
2	Pengukuran Kinerja	25%	15,63	15,94
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,70	10,97
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,20	5,41
5	Capaian Kinerja	20%	9,38	10,50
6	Nilai Hasil Evaluasi	100%	63,84	66,91
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B (Baik)	B (Baik)

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tabel 3.2
 Tindak Lanjut hasil evaluasi Inspektorat

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rencana Aksi
1	Perencanaan kinerja	- Penyusunan indikator tujuan mengikuti kriteria SMART dan juga memperhatikan formulasi yang sesuai dengan Permendagri 87 tahun 2017	- Pengarahan dan pengorganisasian indikator kinerja - Melakukan reviu indikator yang disesuaikan dengan Permendagri 87 tahun 2017 - Penyusunan cascading - Penyusunan PK - Penyusunan SKP

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rencana Aksi
2	Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) - Konsisten menggunakan IKU dalam penyusunan RKT dan PK - Penyusunan pelaporan kinerja akuntabel/data valid 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi internal secara berkala - Koordinasi dan komunikasi kepada pihak terkait
3	Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber data valid dan dapat ditelusuri - Informasi digunakan untuk peningkatan kinerja dan menyeluruh pada organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi dan evaluasi secara internal mengenai pencapaian kinerja
4	Evaluasi Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dilakukan secara berkala 	
5	Pencapaian kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan laporan dengan data akurat yang kompeten atau dapat diverifikasi 	

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi di lingkungan DKP3A tahun 2020 tertera dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	78	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	78	75,68
2	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	65	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	65	72,97

3	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	100	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	100	103,69
4	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,54	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV		
					Triwulan I	2,54	2,09
5	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	40	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	40	80,65

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada indikator kinerja Sasaran 1

Tabel 3.4
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	78	75,68	96,15

Perlindungan perempuan dan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Salah satu bentuk ketidaksetaraan gender adalah tindak kekerasan. Tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga semakin meningkat yang korbannya banyak dialami oleh perempuan dan anak. Untuk melakukan pencegahan, pelayanan penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi

sosial serta penguatan kelembagaan bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi masyarakat. Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan.

Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) DKP3A Provinsi Kaltim Jumlah kasus kekerasan tiap tahunnya semakin meningkat dan yang dilaporkan jauh lebih sedikit dengan kasus yang sebenarnya karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu atau takut dalam melaporkan kekerasan yang dialami, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak. Hal itu juga terjadi karena adanya sarana teknologi diseluruh kab/kota yang memungkinkan melakukan percepatan dalam pelaporan, secara lengkap dapat dilihat dalam grafik berikut :

Tabel 3.5
 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Grafik jumlah kasus kekerasan perempuan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019, 2020 dan 2021



Sumber data : *Simfoni (DKP3A Provinsi Kaltim)*

Berkeaan dengan data Simfoni di atas kasus kekerasan 3 tahun terakhir, kasus kekerasan tahun 2019 berjumlah 629 kasus dan dilayani secara terpadu dan dipresentasikan 94,49 %, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 566 kasus dan dilayani secara terpadu dengan presentase 94,86 %. Dan pada tahun

2021 mengalami kenaikan lagi sebanyak 621 kasus dan dilayani secara terpadu dengan presentase 75,68 % Walaupun kasus kekerasan dari tahun ke tahun dapat diselesaikan dengan baik terlihat dari kenaikan presentase kasus yang ditangani hingga selesai, namun hal tersebut masih menggambarkan adanya pelanggaran hak atas perempuan dan anak artinya perlu dilakukan berbagai upaya yang bersifat komprehensif jumlah kekerasan di Provinsi Kaltim dari dan lintas sektor meliputi Dinas Kesehatan, Penegakan dan Bantuan Hukum, Rumah Sakit untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

pada Kewenangan Urusan PPPA di Provinsi yang dimandatkan dalam UU 23 thn 2014 bahwa Pemerintah Provinsi wajib memberikan layanan perlindungan bagi korban se Kalimantan Timur maka data menjadi pertimbangan pertama dan utama sebagai bahan untuk menentukan kebijakan, strategi, perencanaan, program dan kegiatan pelayanan terhadap korban. Sampai akhir tahun 2021 pelayanan korban dilakukan melalui Satuan Petugas Layanan Korban Kekerasan perempuan dan anak pada DKP3A Provinsi Kaltim. Kasus kekerasan bersifat gunung es hanya permukaannya saja yang nampak namun kasus kekerasan sesungguhnya tidak terduga karena tidak adanya pelaporan kepada bidang layanan.

Pelayanan Kinerja pada urusan perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang tertuang dalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Gubernur Kaltim sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.6
 Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2021

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak	-	-	70	70	82	90
2.4	Rasio KDRT (%)	7,01	27,11	0,066	18,16	27,20	0,029

Sumber : RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023

Sasaran 1. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	89	75,68	85,03

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan Tahun 2021
			2020	2021	
1.	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	94,86	75,68	- 20,22

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis i;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2021)	Tingkat Kemajuan
1	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	90	75,68	84,09

Perbandingan realisasi kinerja indikator persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak sebesar 78 % dan dalam realisasi sudah terpenuhi mencapai 75,68 % sehingga dapat disimpulkan terjadi peningkatan penanganan kasus korban perempuan dan anak di Provinsi Kaltim yang terselesaikan.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	75,68	-	Tidak ada perbandingan kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam peningkatan layanan kekerasan perempuan dan anak disebabkan oleh beberapa hal :

- proses pelaporan kasus kekerasan melalui SIMFONI PPPA Provinsi Kaltim on line yang dilakukan secara berjenjang dari Provinsi dan kab/kota ke KPPA-RI dilakukan secara rutin.
- Sarana dan prasarana secara SDM terlatih di bidang layanan PPPA Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kota memberi kemudahan bagi pelaporan
- Koordinasi antara unit layanan berjalan dengan baik

Alternatif Solusi :

- Melakukan kegiatan yang bersifat kampanye dan massal untuk menyuarakan anti kekerasan/stop kekerasan
- melakukan peningkatan kualitas SDM petugas layanan korban kekerasan
- Peningkatan sarana prasarana dan penguatan kelembagaan unit layanan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	75,68	28,34	47,34

Dari hasil analisa di atas maka dapat digambarkan bahwa untuk capaian indikator sasaran persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan sangat efisien mengingat terjadinya peningkatan penanganan kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan. Dalam kondisi ini dapat diartikan bahwa masyarakat Kaltim memahami akan perlunya pengaduan kasus kekerasan yang secara tidak langsung memahami hak perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Disisi lain negara juga hadir (Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kota) dalam menyediakan sarana dan prasarana berupa lembaga atau unit layanan perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang dilengkapi dengan sistem SIMFONI PPPA.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Kebijakan</i>	4	4
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	30	30
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	orang	30	30
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	0.054	0.029
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	54	29
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Orang	30	25

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	30	25
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kebijakan	3	4
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1	1
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1	1
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang	200	350
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	peserta	100	100
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	peserta	100	150
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	%	0.06	0.09
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	2
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Peserta	350	100
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Peserta	350	100

Capaian indikator kinerja sasaran penurunan angka kekerasan dilakukan melalui pelaksanaan program kegiatan, yaitu :

Program kegiatan yang menunjang capaian unit layanan adalah **Program Perlindungan Perempuan** dengan indikator kinerja adalah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan menghasilkan 4 kebijakan. Melalui program ini dengan **sub kegiatan pelatihan pendampingan korban kekerasan bagi SDM lembaga layanan** dengan sasaran peserta yaitu UPTD se Kaltim dan Satgas PPPA se Kaltim mengharapkan tujuan dari kegiatan ini agar peserta dapat menciptakan suasana konseling yang nyaman dan menjalin hubungan terapeutik dengan korban kekerasan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kaltim masih terus terjadi setiap tahunnya dan seyogyanya korban yang mengalami kekerasan perlu mendapatkan penanganan psikologis dasar dan lanjutan. Sejauh ini SDM yang ada belum seluruhnya dibekali keterampilan stabilisasi emosi maupun penanganan terhadap trauma. Karena kasus semakin meningkat perlu di adakan kegiatan **pelatihan trauma healing bagi SDM UPTDD PPPA/Satgas PPPA Kab/Kota,**

Untuk dapat melaksanakan fungsi kelembagaan serta memberikan pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan dibutuhkan kerjasama dan koordinasi lintas sektor, lintas profesi dan lintas wilayah serta harus berjejaring dengan unit-unit layanan dan OPD terkait maka diadakan kegiatan **Rapat koordinasi UPTD PPPA Kab/Kota se Kaltim** yang diikuti oleh UPTD PPPA se Kaltim, Dinas PPPPA se Kaltim dan satgas PPPA se Kaltim

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) beberapa kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak **melalui kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga melalui workshop gugus tugas KLA** antar kabupaten /kota terkait upaya dan langkah langkah yang harus dilakukan agar Provinsi Kalimantan Timur menjadi Provinsi Layak Anak. Mengingat sampai sat ini 80 % Kab/Kota se Kaltim sudah menerima penghargaan KLA sehingga terus memotivasi 2 kabupaten Kota lainnya yaitu Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Kegiatan yang dilakukan secara tatap muka dan virtual yang diikuti anggota gugus tugas KLA Kabupaten Kutai Barat. Mengharapkan Kabupaten Kutai Barat segera menjadi Kabupaten Layak Anak dan nantinya akan disusul Kabupaten Mahakam Ulu

Kondisi covid-19 sejak tahun 2020 telah menimbulkan dampak-dampak permasalahan sosial baik yang dialami anak, orang tua maupun anggota keluarga lainnya yang masuk dalam kelompok rentan terdampak. Berkenaan dengan hal

tersebut perlu menghadirkan konselor/psikolog untuk mendampingi masyarakat untuk mencegah terjadinya dampak buruk dari kondisi saat ini sekaligus memberikan penguatan bagi masyarakat. Melalui **kegiatan PUSPAGA SHARING SESSION** yang diikuti 150 peserta dari lapisan masyarakat diharapkan meningkatnya pemahaman seluruh lapisan masyarakat terkait konvensi hak anak, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta pemahamannya masyarakat akan fungsi kelembagaan Puspaga dan kelembagaan UPTD PPPA Sebagai tempat rujukan bagi permasalahan yang tidak terselesaikan.

Anak adalah masa depan dan investasi suatu bangsa yang harus mendapat perlindungan. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak anak-anak Indonesia, pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Salah satu pihak yang turut berperan dalam masalah perlindungan anak adalah media massa. Berdasarkan hal tersebut maka diadakan **kegiatan Bimbingan teknis konvensi hak anak bagi media masa se kaltim** yang diikuti 50 peserta guna memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai dasar/filosofi KHA, prinsip dan isi KHA serta peserta mampu mengimplementasikan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam ranah publikasi media masa.

Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di seluruh Indonesia bahkan di Kaltim terus meningkat, hal ini membuat angka putus sekolah juga semakin tinggi. Dengan diadakannya **kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi** yang diikuti 50 peserta lokasi Samarinda dan 50 peserta lokasi Paser dengan cara memberi pembekalan pemahaman rohani, kesehatan dan pencegahan perkawinan anak untuk OPD terkait, toko agama, tokoh masyarakat lembaga terkait, masyarakat dan orang tua.

Kegiatan selanjutnya yaitu **Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi** dilaksanakan dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Samarinda sejumlah 30 orang dari fasilitator Forum Anak Kaltim, Pengurus Forum Anak Kaltim dan Pengurus Forum Anak Kota Samarinda. Dan pelaksanaan selanjutnya di kabupaten paser diikuti sejumlah 35 peserta oleh siswa siswi SMK/SMA, guru pendamping, Forum Anak, Toko masyarakat dan OPD terkait.

8. Capaian Kinerja Lainnya

No.	Jenis penghargaan	Pemberi penghargaan	Tahun diterima	Keterangan
1	Pelopor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Peringkat PUSPAGA Pratama	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	2021	Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (DKP3A)

Sasaran 2. Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender (PPRG)	%	65	72,97	112,26

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kalimantan Timur dilaksanakan tidak hanya di lingkup provinsi, namun juga hingga Kabupaten/Kota, Peningkatan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ini menggambarkan adanya upaya pengintegrasian gender di semua bidang pembangunan dalam penyusunan kebijakan dan program diseluruh ranah politik, ekonomi, sosial dan budaya berbasis pada keadilan gender. Untuk mencapai kondisi tersebut, senantiasa diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur pemerintah selaku pelaku pembangunan dan sekaligus penggerak pengarusutamaan gender itu sendiri meliputi, Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selaku ketua POKJA PUG dan anggota Tim Penggerak/Driver PUG yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku anggota

POKJA PUG dan Tim Penggerak PUG yakni Inspektorat dan Dinas PPPA Kabupaten/Kota yang juga selaku anggota POKJA PUG dan Tim Penggerak PUG didaerah. Tim driver sebagai salah satu Lembaga pengarusutamaan gender secara teknis bertanggungjawab menggerakkan PUG didaerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur selaku pelaksana teknis daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan wajib pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong kegiatan percepatan implementasi PUG didaerah dalam bentuk Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi berupa “Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi”, sebaga I bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan daerah PUG Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gendder (PPRG) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah agar dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan dapat tepat sasaran, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan unik pada perempuan anak dan disabilitas. Kebijakan PPRG dalam pembangunan Provinsi Kaltim merupakan salah satu dari 7 prasyarat yang diperlukan dalam implementasi strategi PUG Provinsi Kaltim. Pemenuhan prasyarat PUG secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi oleh KPPA. Dan pada tahun 2021 DKP3A Provinsi Kaltim mendapat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) peringkat Utama.

Bentuk PPRG adalah adanya dokumen GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) yaitu sebuah metode analisa dalam pelaksanaan program kegiatan. Sampai dengan tahun 2021 Terdapat 27 SKPD yang telah memenuhi dokumen perencanaan berupa GAB dan GBS dari 37 SKPD Provinsi Kaltim. Dengan adanya GBS ini diharapkan kegiatan agar efektif dan efisien serta tepat sasaran.

Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong seluruh Perangkat Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Media massa, Instansi vertikal melaksanakan strategi pembangunan PUG secara konsisten dan berkesinambungan. Capaian Kesetaraan gender merupakan target penting dalam pembangunan manusia baik dalam lingkup global maupun nasional atau daerah.

No	Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	56,64	57,53	65,65	65,54	Belum rilis dr BPS
2.3	Persentase pelaku ekonomi perempuan	-	-	34	37	62	47 98

Sumber: RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019 - 2023

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Peningkatan Tahun 2021
			2020	2021	
1	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	0	72,97	100

Peningkatan realisasi kinerja serta capaian kinerja kebijakan pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah 72,97 %. Pada tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi covid-19 sehingga kegiatan GAP dan GBS oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara tidak bisa terlaksana. Terjadi peningkatan pada tahun 2021 karena jumlah Perangkat Daerah yang terus bertambah dalam melaksanakan analisa GAP dan GBS. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2021)	Tingkat Kemajuan
1	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	100	72,97	72,97

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	0	-	Tidak ada perbandingan kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

kegagalan dalam mencapai target implementasi kebijakan PUG :

- Rendahnya komitmen penentu kebijakan dalam penerapan PUG
- Kurangnya pemahaman tentang implementasi PUG
- Belum optimalnya kelembagaan PUG
- Mutasi SDM yang mahir dalam PUG

Keberhasilan :

- Adanya regulasi pendukung dari Pusat dan Daerah
- Adanya komitmen Kepala Daerah yang tertuang dalam visi dan misi Gubernur yaitu Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia

yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas

Alternatif solusi :

- Melakukan advokasi koordinasi terkait implementasi PUG
- Melakukan keserasian kebijakan PUG di daerah
- Melakukan penguatan kelembagaan PUG
- Melakukan peningkatan kualitas SDM

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	72,97	79,90	-6,93

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Capaian
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	kebijakan	1	1
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	lembaga PUG	3	3
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	peserta	25	25
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	peserta	120	80

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Capaian
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Peserta	60	60
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Peserta	30	50
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peserta	50	60
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peserta	100	80
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	peserta	90	90

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dilakukan melalui pelaksanaan program kegiatan, yaitu :

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan indikator Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Pada program ini terpenuhi 1 target berupa Surat Edaran Gubernur Nomor 465/0408/V/DKP3A/2022 tentang percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kaltim.

Adapun kegiatan lainnya yang menunjang tercapainya kebijakan PUG dalam pembangunan yaitu **kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan Provinsi** yang diikuti peserta Peserta SDM adalah

OPD Driver Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu yang mendapatkan advokasi dan pendampingan sebanyak 25 orang.

Di Provinsi Kaltim masih terdapat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan sehingga memerlukan strategi pembangunan yang memiliki karakteristik untuk mengurangi kesenjangan tersebut melalui **kegiatan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi** yang diikuti oleh sebanyak 40 peserta di Kabupaten Kutai Barat dan 40 peserta di Kabupaten Paser dengan harapan untuk meningkatkan pemahaman aparatur tentang peran dan fungsi OPD driver PUG sertamembangun kapasitas aparatur OPD driver untuk menyusun anggaran responsif gender

Kegiatan lainnya yang menunjang Program di atas yaitu **kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi** yang dilaksanakan di 3 kabupaten/Kota dengan . menyertakan kelompok binaan dari perangkat daerah yang terkait, seperti : Kelompok Usaha Bersama (KUBE), UMKM, UPPKS, Kelompok Wanita Tani (KWT), LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), Desa Prima, PKK dan pelaku ekonomi perempuan. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan di Kota Samarinda sejumlah 30 peserta, Bontang sebanyak 30 peserta serta Paser sebanyak 30 peserta hal ini merupakan salah satu upaya untuk peningkatan ekonomi perempuan di Provinsi Kalimantan Timur, agar dapat berperan sebagaimana mestinya untuk mengangkat kesenjangan sumbangan pendapatan perempuan di Kalimantan Timur.

Memperhatikan kebijakan Permen KPPPA RI no : 2 tahun 2016 tentang pedoman umum pembangunan industri rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui pengelolaan Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) yang diharapkan dapat berkembang menjadi IR (Industri Rumahan), Program pemerintah guna peningkatan dan pengembangan seluruh potensi ekonomi dilakukan melalui pengembangan UMKM. Berkenan dengan hal tersebut maka diadakan **kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi** yang terdiri 70 orang peserta di 2 (dua) tempat lokasi kegiatan. Masing-masing kegiatan berjumlah 35 orang, peserta dari kelompok ekonomi perempuan dan pelaku usaha perempuan Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan harapan agar dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya kelompok atau pelaku ekonomi perempuan sebagai upaya mengangkat kesenjangan ekonomi perempuan di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan lainnya yang menunjang capaian program di atas yaitu **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**

Kewenangan Provinsi. Kegiatan yang meyertakan Perangkat Daerah terkait diikuti terdiri 60 orang peserta di 2 (dua) tempat lokasi kegiatan. Masing-masing kegiatan berjumlah 30 orang peserta, untuk perangkat daerah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai kartanegara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan Perangkat Daerah Kab/Kota terkait mendapatkan advokasi, penguatan kebijakan dan pendampingan sebagai lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

8. Capaian Kinerja Lainnya

No.	Jenis penghargaan	Pemberi penghargaan	Tahun diterima	Keterangan
1	Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 Kategori Utama	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	2021	Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (DKP3A)

Sasaran 3 . Meningkatkan layanan administrasi kependudukan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan		100	103,69	103,69
	Perekaman e KTP				
	Cetak akte kelahiran	%	100	98,85	98,85
		%	100	108,53	108,53

Dari hasil Pelayanan Adminstrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur diperoleh Profil Kependudukan tahun 2021 yang memuat data diantaranya perekaman E-KTP dan cetak akte kelahiran



DATA PEREKAMAN KTP EL
KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR
PROGRES S/D TGL 31 DESEMBER 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	JMH PDDK SMST I 2021	WAJIB KTP SEMESTER I 2021	PEREKAMAN					
				S/D TGL 30 NOV 2021	%	S/D TGL 15 DES 2021	%	S/D TGL 31 DES 2021	%
1	2	3	4					7	8
1	PASER	280,250	195,042	196,963	100.98	197,173	101.09	197,506	101.26
2	KUTAI KARTANEGARA	741,950	506,237	509,967	100.74	510,525	100.85	511,386	101.02
3	BERAU	253,979	173,716	178,207	102.59	178,431	102.71	178,662	102.85
4	KUTAI BARAT	168,348	119,241	118,210	99.14	118,317	99.23	118,428	99.32
5	KUTAI TIMUR	424,447	297,067	266,167	89.60	267,497	90.05	270,024	90.90
6	PENAJAM PASER UTARA	185,022	128,475	127,985	99.62	128,093	99.70	128,246	99.82
7	MAHAKAM ULU	35,171	25,962	25,621	98.69	25,653	98.81	25,668	98.87
8	BALIKPAPAN	704,110	495,275	499,952	100.94	500,489	101.05	501,227	101.20
9	SAMARINDA	825,494	582,491	585,783	100.57	586,493	100.69	587,513	100.86
10	BONTANG	185,201	128,816	129,443	100.49	129,621	100.62	129,810	100.77
JUMLAH		3,803,972	2,652,322	2,638,298	99.47	2,642,292	99.62	2,648,470	99.85

LAPORAN KINERJA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0 - 18 TAHUN
PROGRES S/D TGL 31 DESEMBER 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	ANAK 0 - 17 TH SEMESTER I 2021	DATA S/D 30 NOV 2021		DATA S/D 15 DES 2021		DATA S/D 31 DES 2021	
			MEMILIKI	%	MEMILIKI	%	MEMILIKI	%
1	2		6		6		4	5
1	PASER	88,608	96,519	108.93	96,871	109.33	97,248	109.75
2	KUTAI KARTANEGARA	245,917	263,429	107.12	264,212	107.44	264,989	107.76
3	BERAU	82,913	88,433	106.66	88,433	106.66	88,433	106.66
4	KUTAI BARAT	52,807	58,458	110.70	58,625	111.02	58,859	111.46
5	KUTAI TIMUR	138,632	154,598	111.52	155,272	112.00	156,019	112.54
6	PENAJAM PASER UTARA	60,744	64,561	106.28	64,674	106.47	64,839	106.74
7	MAHAKAM ULU	10,006	14,217	142.08	14,321	143.12	14,352	143.43
8	BALIKPAPAN	220,814	230,774	104.51	231,356	104.77	231,960	105.05
9	SAMARINDA	258,692	279,067	107.88	279,779	108.15	280,574	108.46
10	BONTANG	61,317	66,967	109.21	67,109	109.45	67,293	109.75
JUMLAH		1,220,450	1,317,023	107.91	1,320,652	108.21	1,324,566	108.53

Sumber data : e-infodukKaltim

meliputi data administrasi kependudukan : Realisasi Perekaman e KTP per 31 Desember 2021 adalah 98,85 % dan Realisasi Cetak akte kelahiran per 31 Desember 2021 adalah 108,53 %.

Data penduduk Kabupaten Kota se Kaltim berdasarkan jumlah Kepala Keluarga per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 1.037.035 kepala keluarga, meliputi : kepala keluarga perempuan sebanyak 226.796 orang sedangkan kepala keluarga laki-laki sebanyak 1.263.831 orang. Jumlah penduduk berdasarkan data terpilah menunjukkan jumlah penduduk perempuan hampir sebanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Terdapat data dengan kriteria lain yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen

dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Tertibnya administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota akan menggambarkan keluaran data kependudukan dan pencatatan sipil yang dihasilkan secara berkualitas dan valid.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2021
			2020	2021	
1.	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	%	100,15	103,69	3,53

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2021)	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	%	100	103,69	103,69

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi Nasional	Ket
1	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	%	103,69	99,20	Terpenuhi

--	--	--	--	--	--

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional nampak dalam tabel dukcapil Provinsi Kaltim dapat memenuhi standar nasional baik dalam perekaman e KTP maupun cetak akte kelahiran

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Keberhasilan :

- a. Capaian kinerja dalam peningkatan layanan adminduk berupa perekaman e KTP karena penduduk sudah memahami betapa pentingnya administrasi kependudukan untuk mendapatkan pelayanan publik kesehatan, pendidikan, dll.
- b. SOP untuk mendapatkan administrasi kependudukan mudah dipahami oleh masyarakat
- c. Sarana prasarana penyelenggaraan adminduk tersedia di Perangkat Daerah terkait

Kegagalan :

- a. Keterbatasan penyediaan blanko e KTP

Solusi :

- Melakukan pelatihan dan bimtek bagi ADB agar memberikan pelayanan lebih cepat
- Melakukan sosialisasi kampanye kepada masyarakat akan pentingnya adminduk
- Fasilitasi sarana dan prasarana di kab kota berupa alat cetak dan alat rekam e KTP.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	103,69	81,55	22,14



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	<i>Kebijakan</i>	6	6
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Dokumen	6	6
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Dokumen	6	6
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	<i>Kebijakan</i>	6	6
Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	6	6
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Dokumen	6	6
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Kebijakan</i>	5	5
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Data Kependudukan	3	3
Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Data Kependudukan	3	3

Tercapainya indikator kinerja Meningkatnya layanan administrasi kependudukan berupa perekaman dan pencetakan akte kelahiran. Capaian di atas juga didukung oleh kegiatan Pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator Kebijakan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah Perjanjian kerjasama dengan Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan di antaranya : Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie, RS Atma Husada Mahakam, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, RS Kanudjoso Djatiwibowo. Pemanfaatan data dimaksud agar data dapat dilakukan secara terintegrasi dan lengkap.

Sasaran 4 . Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,54	2,09	82,28

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2021
			2020	2021	
1	2	3	4	5	$6=(5/4-1)*100$
1.	Laju pertumbuhan penduduk	%	3,67	2.09	'-43,05

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi (Th. 2021)	Tingkat Kemajuan
-----	-------------------	--------	----------------------	----------------------	------------------

			(Th. 2023)		
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,50	2,09	83,6

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,09	1,43	68,42

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- a. Tingginya partisipasi pasangan usia subur dalam mengikuti program KB
- b. Kemudahan pada akses pelayanan KB

Kegagalan :

- a. Adanya pangaruh dari imigrasi penduduk yang cukup tinggi dibandingkan angka kelahiran

Solusi :

- Melakukan edukasi kepada organisasi masyarakat, pemerhati perempuan tentang program KB
- Koordinasi dengan dinas KB se kab kota dalam upaya peningkatan program KB

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (\geq 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Laju			



	pertumbuhan penduduk	2,09	90,55	'-88,46
--	----------------------	------	-------	---------

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Target	Capaian
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>Kebijakan</i>	1	1
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1	1
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peserta	200	160
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peserta	80	160
Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Peserta	60	50
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Peserta	60	80
Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	peserta	30	30
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Peserta	140	140
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peserta	140	140



Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	peserta	140	140
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	SKPD	7	7
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	peserta	100	150

Program Pengendalian Penduduk Dalam pencapaian sasaran Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diantaranya adalah untuk Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan GDPK Provinsi yang terdiri dari pejabat administrator Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan/Lembaga dan Organisasi terkait yang ditunjuk sebagai anggota Tim Penyusun. Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut diantaranya :

Rapat Pembentukan Tim Penyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar dihadiri oleh 20 Dinas, Lembaga dan Organisasi terkait dalam rencana penyusunan Provinsi Kalimantan Timur. Proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Oleh karena itu penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat penting dan urgen.

Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2021. Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 peserta terdiri dari 20 peserta kabupateb/kota dan 30 peserta lingkup Pemprov Kaltim. Strategi pelaksanaan GDPK melalui lima aspek/pilar yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan pengembangan data base kependudukan.

Program Pembinaan Keluarga Berencana aksi Keluarga Berencana a) Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bagi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Provinsi Kaltim Tahun 2021

Kegiatan ini dihadiri 80 orang terdiri dari remaja dan usia sebaya yang tergabung dalam PIK-Remaja Kaltim, PIK-R Kota Samarinda, Forum Anak Kelurahan, Forum Anak

Kaltim, Forum Anak Kota Samarinda, Remaja PKBI, Bina Keluarga Remaja. Adapun kegiatan yang mendukung program ini diantaranya :

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pada Pencegahan Stunting

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan kegagalan seorang anak untuk tumbuh dan berkembang optimal. Hal tersebut merupakan dampak dari kekurangan gizi secara kumulatif, sehingga pertumbuhan anak terlalu pendek untuk usianya dan diikuti dengan penurunan kemampuan kognitif serta biasanya disertai pula dengan berbagai penyakit bawaan lainnya. “Ini mengakibatkan resiko tinggi jangka panjang dan di masa depan akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang mempunyai daya saing atau kurang kompetitif

Kabupaten Penajam Paser Utara akan menjadi Ibu Kota Negara yang dicanangkan oleh pemerintah. Maka perlu upaya peningkatan kapasitas masyarakat atau sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan dan tantangan agar dapat ikut berperan aktif di dalam sektor pembangunan dengan mempersiapkan generasi yang sehat dan tangguh. “Karena pembangunan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, kuat dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan dinamika kehidupan,”

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pada Pencegahan Stunting Advokasi / Konseling bagi Calon Pengantin (Catin)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim terus berupaya untuk menekan angka perceraian, penurunan dan pencegahan stunting. Salah satunya melalui Advokasi/Konseling Bagi Calon Pengantin untuk memberikan pembekalan kepada calon ayah dan bunda yang akan mempersiapkan generasi yang berkualitas tinggi, baik secara fisik, mental dan spritual

Program pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga

Work Shop Ketahanan Keluarga Tahun 2021 dengan tema “Penguatan Ketahanan Keluarga Dalam Aspek Ekonomi dan Mental Spiritual di Masa Pandemi Covid 19

Pembangunan Keluarga merupakan salah satu isu tematik dalam pembangunan nasional karena kekuatan pembangunan nasional berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro di dalam masyarakat. “Penguatan Ketahanan Keluarga sangat diperlukan karena banyak masalah – masalah sosial seperti, kekerasan dalam rumah tangga,

trafficking, pornografi, pornoaksi, infeksi penyakit menular, HIV/AIDS, narkoba, kriminalitas dan lain sebagainya karena akibat dari runtuhnya pondasi ketahanan keluarga

Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2021 dalam Rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke-93 Tahun 2021 dengan Tema “Perempuan Indonesia; Berdaya Untuk Pemulihan Ekonomi Bangsa (Pasca Pandemi Covid19)

Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur sebagai leading sector Peringatan Hari Ibu yang ke-93 Tahun 2021, dilaksanakan beberapa rangkaian acara yaitu : 1. Rakor Perempuan 2. Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga 3. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan 4. Puncak PHI Ke-93 Tahun 2021

Capaian dalam pembentukan Kampung KB (Keluarga Berkualitas) di 10 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sebagaimana dalam Indikator dan Capaian Kinerja DKP3A melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tergambar dalam tabel berikut :

Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

No	Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.5	Kampung KB	160	175	154	160	175	299

Sumber: RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019 - 2023

Sasaran 5 . Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	40	80,65	201,64

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2019
			2020	2021	
1.	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	61,11	80,65	31,98

Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data 80,65 % atau baru 7 Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender meliputi : RS Abdul Wahab Sjhranie, RS Atma Husada Mahakam, RS Kanudjoso Djatiwibowo, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Dinas komunikasi dan Informasi.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RENSTRA yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2021)	Tingkat Kemajuan
1	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	50	80,65	

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1	Persentase Perangkat	%	80,65	0	Tidak ada perbandingan

	Daerah yang memanfaatkan data gender				kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.
--	--------------------------------------	--	--	--	---

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- i. Adanya kebijakan dan data regulasi yang memanfaatkan penggunaan data pilah sebagai dasar proses penyusunan program kegiatan
- ii. Tingginya komitmen perangkat daerah dalam penyelenggaraan program one map one data, sehingga data gender bagian dari hal tersebut

Kegagalan :

- iii. Perangkat daerah belum menggunakan data pilah sebagai awal penyusunan program kegiatan
- iv. Rendahnya jumlah dan kualitas SDM pengelolaan data pilah

Solusi :

- v. Sosialisasi dan bimtek terkait penyusunan data pilah/data gender

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (\geq 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	80,65	95,41	-14,76

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Target	Capaian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	%	65	70
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	%	65	70
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Data	20	45
	Data	20	43
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Data	20	32

Program pengelolaan sistem data gender dan anak dengan indikator capaian data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah memiliki kegiatan pendukung diantaranya Kegiatan Pengumpulan/Pengolahan Data Terpilah Anak yang diikuti sebanyak 45 peserta dari perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota se Kaltim. Tujuan kegiatan yaitu untuk mengetahui ketersediaan data terpilah anak secara up-to-date Baik Provinsi maupun Kabupaten Kota 2. Mendorong dan meningkatkan pemanfaatan data terpilah anak di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan Bimbingan teknis analisis bimbingan teknis analisis data anak yang diikuti sebanyak 18 peserta dari Kab/Kota . Bimbingan Teknik analisis data anak terfokus pada pengolahan dan caranya bagaimana teknik pengolahan analisis data (khususnya kekerasan terhadap anak) usia 0-5 tahun, 5-10 tahun, dan 10-18 tahun, data di peroleh dari SIMFONI PPA yang sudah ada tersedia sebagai contoh dalam menganalisis data kekerasan terhadap anak. Selanjutnya **Kegiatan informasi dan data gender dengan tema pengumpulan/pengolahan data terpilah**” Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengintegrasian Hak Anak diperlukan ketersediaan data terpilah sebagai Pembuka wawasan dalam peningkatan koordinasi antara pengelola baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota

guna mewujudkan suatu sistem pengelolaan dan informasi data Gender dan Anak kegiatan yang diikuti sebanyak 40 peserta dari Perangkat Daerah Kaltim

Kegiatan pelatihan sistem pendataan sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui aplikasi sistem informasi on line perlindungan perempuan dan anak (simfoni PPPA) Kaltim

Kegiatan yang diikuti sebanyak 14 peserta dari Operator/Admin SIMFONI PPA dengan harapan untuk meningkatkan kinerja petugas pengelola data kekerasan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, memperbaiki data kekerasan yang optimal, Mekanisme koordinasi pengelolaan data kekerasan antar jejaring di unit pelayanan perempuan dan anak berjalan dengan baik dan akuntabel

Kegiatan Rapat koordinasi teknis sistem informasi gender dan anak yang diikuti sebanyak 24 peserta diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu tersusunnya basis data Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi maupun Kab/Kota di Kalimantan Timur untuk dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan kepentingan.

Kegiatan Penyusunan profil gender bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang gender dan anak di Kalimantan Timur Tahun 2021 secara umum yang dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan memiliki output tersusunnya Profil Gender dan Anak Tahun 2021 dapat dijadikan rujukan sebagai salah satu acuan bagi penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

D. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja tertera dalam tabel berikut

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	78	75,68	97,03	9.798.094.625	2.776.847.036	28,34
2	eningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	65	72,97	112,26	451.497.500	325.120.563	72,01
3	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	100	103,69	103,69	4.158.998.000	3.743.867.325	90,01
4	terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	2,54	2,09	82,28	362.962.500	213.736.357	58,89
		40	80,65				

5	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak			201,63	156.625.000	121.032.572	77,28
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana	90	90	100	3.712.677.082,50	2.935.874.628	79,08
Total Belanja Langsung					9.969.985.082	7.895.451.775	79,19

2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

No	Program/kegiatan	Anggaran			Ket
		Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,496,914,174	12,101,791,812	83.21	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	454,075,375	369,694,491	81.42	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,344,839,000	7,893,688,511	84.47	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	989,167,624	938,989,590	94.93	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,137,648,540	1,736,289,915	81.22	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1,571,183,635	1,163,129,305	74.03	



No	Program/kegiatan	Anggaran			Ket
		Alokasi	Realisasi	%	
	Bangunan Lainnya				
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	999,325,201.00	748,506,351	72.79	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	300,000,000	228,408,016	76.14	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	250,000,000	149,212,509	59.69	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	449,325,201	370,885,826	82.54	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	948,094,625	530,143,768	68.78	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	205,425,000	175,853,725	85.60	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	179,310,000	152,191,138	84.88	

No	Program/kegiatan	Anggaran			Ket
		Alokasi	Realisasi	%	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	563,359,625	202,098,905	35.87	
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	500,000,000.00	477,025,547	95.41	
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	300,000,000	294,408,222	98.14	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	200,000,000	182,617,325	91.31	
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	8,375,000,000	1,857,823,870	56,25	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	59,575,000	54,093,000	90.80	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	8,315,425,000	1,803,730,870	21.69	
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	475,000,000	41.4112.200	82,09	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan	250,000,000	194,855,200	77.94	



No	Program/kegiatan	Anggaran			Ket
		Alokasi	Realisasi	%	
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	225,000,000	194,024,198	86.23	
7	PROGRAM PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN	4,680,000,000	3,951,600,510	84.44	
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	4,680,000,000	3,951,600,510	84.44	
8	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	170,000,000	115,369,284	67.86	
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	170,000,000	115,369,284	67.86	
9	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1,476,175,000	1,091,734,499	73.96	
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,326,175,000	997,036,599	75.18	

No	Program/kegiatan	Anggaran			Ket
		Alokasi	Realisasi	%	
	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	150,000,000	94,697,900	63.13	
10	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	150,000,000	138,996,176	92.66	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	150,000,000	138,996,176	92.66	
11	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	150,000,000	123,791,749	82.53	
	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	40,000,000	27,252,147	68.13	
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	40,000,000	36,636,958	91.59	
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	70,000,000	59,902,644	85.58	
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	160,000,000	153,751,858	96.09	



No	Program/kegiatan	Anggaran			Ket
		Alokasi	Realisasi	%	
	SEJAHTERA (KS)				
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	160,000,000	153,751,858	96.09	
	Total BelanjaLangsung	32,580,509,000	21,679,414,822	66.54	

BAB IV PENUTUP

Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

5 (lima) sasaran strategis sebagai target diukur dengan memperhatikan 5 (lima) indikator kinerja. Berdasarkan uraian capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

- SASARAN 1 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT, yaitu jumlah kasus yang dilayani dibanding dengan jumlah kasus yang masuk dengan capaian 75,68 %
- SASARAN 2 Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG), yaitu Persentase Perangkat Daerah yang melakukan analisa gender berupa GAB dan GBS pada Program yang termuat dalam DPA dengan capaian 72,97 %
- SASARAN 3 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Kaltim, berada pada 3,67 % di sehingga laju pertumbuhan penduduk Kaltim dengan capaian kinerja 2,54 %
- SASARAN 4 Meningkatnya layanan administrasi kependudukan, Provinsi Kaltim untuk perekaman/cetak e KTP dan kepemilikan akta kelahiran tahun 2021 dengan capaian kinerja 103,69 %
- SASARAN 5 Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender dengan capaian kinerja 80,65 %

Permasalahan utama/issue strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 telah tersolusikan seiring dengan proses pencapaian sasaran-sasaran, meskipun belum bisa secara ideal, sehingga terus dilakukan secara berkelanjutan upaya-upaya :



1. Meningkatkan pelebagaan PUG di lembaga pemerintah tingkat provinsi dan mendorong Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelebagaan PUG di Kabupaten/Kota masingmasing melalui upaya pelatihan, pendampingan dan evaluasi pelaksanaan;
2. Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan pemahaman pendidikan politik bagi perempuan dan advokasi kader organisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan;
3. Penurunan jumlah korban melalui upaya pencegahan (media KIE, kampanye, advokasi, kerjasama dunia usaha dan lembaga masyarakat) dan pengurangan risiko pada perempuan dan anak kelompok rentan (rawan terjadi tindak kekerasan);
4. Peningkatan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan SDM petugas layanan, tata laksana, sarana prasarana, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemanfaatan teknologi dan informasi serta mengembangkan jejaring penanganan korban;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.

Samarinda, 24 Februari 2022

KEPALA DINAS

Hj. NORAYANI SORAYALITA, SE, MMT

Pembina Utama Muda
NIP. 19651215 198601 2 002

